

**ANALISIS POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN
TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN TAPANULI
TENGAH
SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Putri Andriani Tanjung
NPM : 1905180003
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : PUTRI ANDRIANI TANJUNG
NPM : 1905180003
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(Signature)
(Dra. ROSWITA HAENI, SE., M.Si)

(Signature)
(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Signature)
(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(Signature)
(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Signature)
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : PUTRI ANDRIANI TANJUNG

NPM : 1905180003

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : JL. BUKIT BARISA NO.1 MEDAN

Judul : ANALISIS POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN
TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN
TAPANULI TENGAH.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

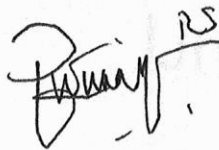


Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. TANJURI, SE., MM., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Putri Andriani Tanjung
N.P.M : 1905180003
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat Rumah : Jl. Bukit Barisan No. 1 Medan
Judul Skripsi : Analisis Potensi Subsektor Perikanan terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26-07-2023	- Skrip table 4.10 - Untuk perkembangan selter perikanan, mula dari cakupan Indonesia, Sumut dan Tapteng Masukkan volume dan nilai X, Neg fu, Peralatan dsb. - Utk analisis potensi (LR dan Shift Share) ambil data sel perikanan saja.	} Lh	
30-07-2023	- Perbaharui dan perbaiki semua koreksi yuda - Kaitkan hasil LR dan Shift Share ke teori dan elaborasi lebih dalam lg.	} Lh	
03-08-2023	- Buat abstraksi - Lengkapi daftar tabel isi, gambar - Perbaharui daftar pustaka	} Lh	
08-08-2023	Telah selesai diperbaiki dan acc untuk ujian skripsi	} Lh	

Pembimbing Skripsi

Medan, Agustus 2023
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI ANDRIANI TANJUNG**
NPM : 1905180003
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP
PEREKONOMIAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



Putri Andriani Tanjung

PUTRI ANDRIANI TANJUNG

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada penulis sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Potensi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah**”.

Dalam penyusunan dan penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam kesempatan ini , dengan sepenuh hati penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa,dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sahlul Tanjung dan Ibunda Nurhayati Manalu serta saudara kandung saya adik- adik saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan, selama pembuatan Skripsi ini serta doa yang tulus dari kedua orang tua saya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Januri,SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dra. Roswita Hafni M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan baik dan lancar.
10. Bapak dan Ibu seluruh pegawai dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Untuk sahabat saya dari kecil Juniaty dan sahabat saya dalam perkuliahan yaitu Yunita, Syaidah, Yeni, Safira, Ersha dan Khalida yang mewarnai hari-hari selama kuliah terimakasih untuk pertemuan terindahny.Terimakasih untuk banyak hal yang telah kita lalui bersama- sama.
12. Untuk kakak saya Saputri yang telah banyak memberi dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan cara masing- masing telah membantu penulis dalam proses penyelesain skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih , semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermamfaat bagi semua pembaca dan semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2023

Putri Andriani Tanjung

NPM 1905180003

ABSTRAK

“Analisis Potensi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah”

Putri Andriani Tanjung
Ekonomi Pembangunan
putriandrianitanjung5@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi subsektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengetahui perkembangan subsektor perikanan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan nasional di Tapanuli Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara tahun 2013 sampai dengan 2022 serta Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi subsektor perikanan terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, menggunakan data berupa angka atau nilai, yang kemudian dievaluasi dengan menambahkan informasi untuk menjelaskan data kualitatif menggunakan metode Location Quotient (LQ), dan analisis shift share. Hasil penelitian yang didapatkan subsektor perikanan menggunakan Location Quotient (LQ) mengalami kenaikan di tahun 2022 dan menjadi titik awal di tahun 2013 dengan hasil LQ di tahun 2013 sebesar 79,38 hingga tahun 2022 mencapai 82,09.

Kata Kunci : Subsektor Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi, LQ, Shift Share

ABSTRACT

“ of the Potential of the Fisheries Sub-sector on the Economy of Central Tapanuli Regency”

Putri Andriani Tanjung
Economic development
putriandrianitanjung5@gmail.com

The purpose of this study is to analyze the potential of the fisheries sub-sector in Central Tapanuli Regency, to determine the development of the fisheries sub-sector and the development of economic as well as national income in Central Tapanuli Regency. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Central Tapanuli and North Sumatra Regencies from 2013 to 2022 and the data analysis technique used in this study is normative qualitative analysis. In this study the analysis used to determine the potential of the fisheries sub-sector for the economy of Central Tapanuli district uses numbers or values which are then evaluated by adding information to explain qualitative data using the Location Quotient (LQ) method and shift share analysis. The research results obtained by the fisheries sub-sector using the Location Quotient (LQ) have increased in 2022 and became the starting point in 2013 with LQ results in 2013 of 79.38 until 2022 it reaches 82.09.

Keywords: Fishery Subsector, Economic Growth, LQ and Shift Share

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Batasan Masalah.....	19
1.4. Rumusan Masalah	19
1.5. Tujuan Penelitian.....	19
1.6. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.2. Tahap – Tahap Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.3. Ciri – Ciri Pertumbuhan Ekonomi	24
2.1.4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	24
2.1.5. Subsektor Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	27

2.2.	Pengertian Pendapatan Nasional	27
2.2.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional	27
2.2.2.	Konsep Yang Berkaitan Dengan Pendapatan Nasional	28
2.2.3.	Manfaat Pendapatan Nasional	30
2.2.4.	Komponen Pendapatan Nasional	31
2.2.6.	Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan	34
2.2.7.	Kebijakan dan Tindakan Larangan Kelautan	36
2.3.	Pengertian Potensi Subsektor Perikanan.....	39
2.3.1.	Pembagian Sektor Perikanan	41
2.3.2.	Manfaat Potensi Subsektor Perikanan	42
2.3.3.	Rencana Pembangunan Sektor Perikanan.....	44
2.3.4.	Kebijakan Pemerintah Mengenai Sektor Perikanan Di Indonesia.....	45
2.3.5.	Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Hasil Perikanan.....	47
2.4.	Penelitian Terdahulu	48
2.5.	Kerangka Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1.	Jenis Penelitian.....	52
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	54

3.4.	Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		55
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	55
4.1.1.	Letak Geografis	55
4.1.2.	Kondisi Topografi	57
4.1.3.	Kondisi Klimatologi.....	57
4.1.4.	Kondisi Demografis Kabupaten Tapanuli Tengah.....	58
4.2.	Analisis Potensi Subsektor Perikanan.....	60
4.2.1.	Perkembangan Subsektor Perikanan Di Indonesia	60
4.2.2.	Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan Di Indonesia	61
4.2.3.	Perkembangan Sektor Perikanan Di Sumatera Utara.....	64
4.2.4.	Produk Domestik Regional Bruto Di Sumatera Utara	66
4.2.5.	Ekspor Perikanan di Sumatera Utara	66
4.2.6.	Perkembangan Subsektor di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	68
4.2.7.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Tapanuli Tengah	69
4.2.8.	Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Perikanan Di Tapanuli Tengah.....	70
4.3.	Analisis Potensi Subsektor di Kabupaten Tapanuli Tengah	73
BAB V PENUTUP.....		79

5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data PDB Kelautan 2012 – 2018.....	3
Gambar 1.2. Nilai Ekspor Impor produk perikanan indonesia Periode Januari-Juli 2022.....	6
Gambar 1.3. Sepuluh Provinsi Dengan Angka Konsumsi Ikan Tertinggi Tahun 2021.....	7
Gambar 2.4. Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan 2017-2018.....	33
Gambar 2.5. Kerangka Konseptual.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nilai Ekspor Menurut Provinsi Asal Tahun 2016-2020.....	8
Tabel 1.2. Perkembangan NTN Tahun 2019-2021 dengan Tahun Dasar 2018...	10
Tabel 1.3. Harga Sektor Perikanan Menurut Provinsi 2016-2021	11
Tabel 1.4. Produksi Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.....	15
Tabel 1.5. Jumlah Ekspor Perikanan di Sumatera Utara Menurut Negara Tujuan 2018-2022.....	16
Tabel 1.7. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Triwulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021.....	17
Tabel 1.8. Produksi Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	18
Tabel 3.9. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
Tabel.4.10 Produksi Perikanan Menurut Subsektor (Ton) di Tahun 2011-2020	58
Tabel. 4.11. Ekspor Ikan Segar Hasil Tangkap Menurut Negara Tujuan Utama 2012-2022.....	60
Tabel 4.12. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2022.....	62
Tabel 4.13 Ekspor Perikanan Di Sumatera Utara 2013-3022.....	63
Tabel 4.14. DPRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 2013-2022.....	65
Tabel 4.15. PDRB Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, 2018-2022.....	65
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sub Sektor Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.....	66
Tabel 4.17. Tabel National Share.....	68
Tabel 4.18. Tabel National Share.....	69

Tabel 4.19. Tabel National Share.....	69
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang terletak di benua Asia, tepatnya wilayah Asia Tenggara dan terkenal karena ribuan pulau serta pemandangan alam laut dan wilayah dataran tinggi yang sangat indah. Luas Indonesia adalah 1.919.440 km² dengan luas daratan 1.826.440 km² dan luas 93.000 km² terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan total luas wilayah (darat dan perairan) mencapai 8.300.000 km². Pada laman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa total luas wilayah Indonesia tersebut 3,25 juta km² merupakan lautan dan 2,55 km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km² wilayah Indonesia yang berupa daratan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km².

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dalam pidatonya pada National Maritime Convention tahun 1963, Presiden Soekarno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, maka Indonesia harus dapat menguasai lautan. Dari kutipan tersebut, Bung Karno telah mengarahkan perhatiannya kepada sisi maritim. Hal ini berkaitan erat apabila dihubungkan dengan sejarah Indonesia di masa lalu, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan karena berorientasi pada sektor maritim.

Menurut (Siahaan, 2016) Subsektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari sektor pertanian yang diketahui memiliki potensi besar yang dapat terus dikembangkan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari sumberdaya hayati yang melimpah pada subsektor ini serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia merupakan negara yang memiliki produksi perikanan tangkap terbesar ke-4 dunia setelah China, Peru, Amerika Serikat, dan Chile. Akan tetapi, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, produksi Indonesia masih tergolong kecil, yakni 5,05 persen dari total perikanan tangkap dunia.

Menurut (Ilyas, S., & Cholik, 2017) Perikanan merupakan suatu kegiatan perekonomian, dimana manusia mengusahakan sumber daya alam perikananannya secara lestari guna mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Pembangunan sub sektor perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

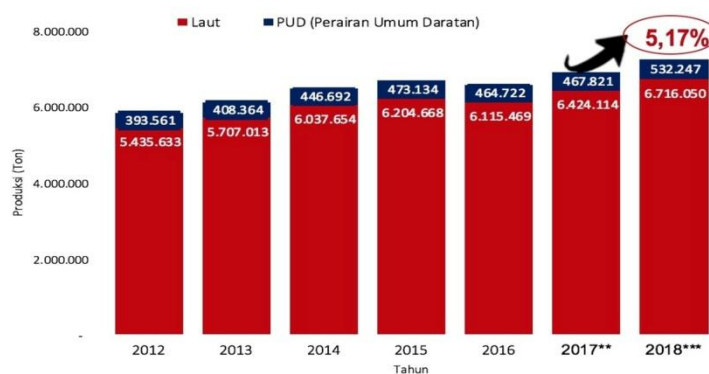
Pada 22 Januari 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menyatakan, 62 persen wilayah Indonesia berupa laut, tetapi kontribusi ekonomi produk domestik bruto sektor kelautan dan perikanan sangat kecil, hanya 2,8 persen. Bahkan, disoroti juga, pangsa pasar ekspor hasil perikanan dalam perdagangan dunia hanya 3,5 persen.

Terdapat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia pada 29 Maret 2022, Menteri Keuangan kembali meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bisa membenahi sistem perikanan Indonesia agar dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena Indonesia

sebagai negara kepulauan didominasi laut sehingga sudah semestinya kontribusi dari perikanan meningkat.

Kemudian pada 28 Juni 2022, menurut Badan Statistik (BPS) sektor kelautan dan perikanan yang kontribusinya kecil dalam menyumbang PDB ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cara menghitung nilai PDB perikanan yang digunakan selama ini atas dasar harga konstan (ADHK) untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Adapun rumus PDB yang paling banyak digunakan adalah metode pengeluaran dengan menjumlahkan total pengeluaran pemerintah (G), serta selisih ekspor dan Impor (X-M). Realisasi pertumbuhan PDB perikanan dijadikan salah satu indikator kinerja utama KKP yang jika dihitung rata-rata pertumbuhan PDB perikanan periode 2014-2021 sebesar 3,99 persen, sedangkan realisasi pertumbuhan PDB tertinggi tahun 2015 mencapai 7,89 persen.

Di sisi lain, realisasi pertumbuhan PDB terendah terjadi pada 2020 sebesar 0,73 persen atau hanya mencapai 9,24 persen dari target yang ditetapkan Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu 7,9 persen. Pertumbuhan PDB 2021, walaupun meningkat menjadi 5,45 persen, persentase pencapaiannya hanya 62,57 persen dari target Renstra KKP sebesar 8,71 persen.



Sumber : Kompas.id

Gambar 1.1. Data PDB Kelautan 2012 – 2018

Jika mengacu kepada angka laju pertumbuhan PDB kelautan dan perikanan sebenarnya relatif cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lain, bahkan realisasi pertumbuhan rata-rata PDB perikanan periode 2000-2021 mencapai 5,5 persen. Namun, yang perlu ditelaah lebih jauh, mengapa pertumbuhan PDB kelautan dan perikanan yang cukup tinggi ini kontribusinya sangat minim terhadap PDB nasional sehingga kurang bermanfaat sebagai indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan.

Justru komponen investasi dalam PDB perikanan multiplier effectnya lebih signifikan dalam mendorong peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan. Namun, ironisnya nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) sektor perikanan faktanya masih sangat minim.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, dari tahun 2014 sampai 2021 realisasi nilai investasi PMDN di sektor perikanan hanya Rp 2,24 triliun atau hanya 0,09 persen dibandingkan dengan nilai investasi seluruh sektor. Begitu pula realisasi nilai investasi PMA relatif minim, total hanya 334 juta dollar AS atau kurang dari Rp 5 triliun selama 8 tahun, sangat jomplang dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan KKP.

Angka konsumsi ikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada statistik.kkp pada tahun 2021 tercatat Provinsi Maluku menduduki peringkat pertama Angka Konsumsi Ikan (AKI) tertinggi dengan nilai 77,49 kg/kapita/tahun, posisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menduduki peringkat kedua dengan AKI 73,82 kg/kapita/tahun. Posisi kedua ditempati Maluku Utara dengan rata-rata konsumsi ikan sebesar 75,75 kg/kapita/tahun. Setelahnya ada Kalimantan Utara dengan rata-rata konsumsi ikan mencapai 73,94 kg/kapita/tahun. Kemudian, rata-rata konsumsi kalori per kapita dari ikan di Kepulauan Riau sebesar 71,61 kg/kapita/tahun. Di Sulawesi Tenggara, rata-rata konsumsi ikan mencapai 70,95 kg/kapita/tahun. Rata-rata konsumsi ikan di Sulawesi Utara 67,28 kg/kapita/tahun meningkat dari tahun sebelumnya 66,82 kg/kapita/tahun. Posisinya diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan dengan rata-rata konsumsi ikan masing-masing sebesar 67,16 kg/kapita/tahun dan 66,81 kg/kapita/tahun. Sedangkan rata-rata konsumsi ikan terendah dari sepuluh data tertinggi adalah Provinsi Aceh dan Gorontalo dengan angka konsumsi ikan masing-masing 66,21 kg/kapita/tahun dan 65,54 kg/kapita/tahun.

Dalam buku warta ekspor Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk, kekayaan laut. Laut Indonesia mengandung sumber daya hayati yang kaya. Ikan Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis dan keunggulannya. Ikan tuna, kakap, ikan pedang, ikan mas, mujair adalah beberapa nama ikan yang sering dikonsumsi masyarakat. Besarnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia menjadikannya sebagai salah satu komoditi ekspor yang sangat diandalkan dalam meningkatkan devisa negara. Nilai ekspor utama Indonesia dengan kode HS 0303 (fish, frozen, excluding fish fillets and

otherfish meat of heading No.03.04) dari tahun 2012 ke 2013 turun 1,26%. Sementara itu, untuk kode HS 0304 (fish, fillets and other fish meat --whether or not minced, fresh, chilled or frozen) juga merosot 7,24% dalam periode yang sama. (Statistik Perdagangan, Desember 2013).

Sebelumnya, volume ekspor untuk jenis barang Fish, froze, excluding fish fillets and other fish meat Of healing menunjukkan tren kenaikan sebesar 18,92% selama tahun 2008-2012. Namun, antara tahun 2012 dan 2013 (Jan-Agustus), kenaikannya hanya 6,91% dengan ekspor ke Thailand tumbuh 15,50%, Tiongkok (11,83%), Jepang (-9,82%), Amerika Serikat (3,27%), Vietnam (-20,17%), dan negara lainnya (-0,66%). Ekspor kategori produk fish fillets and other fish Meat (whether or not minced), fresh, chileed or frozen masih tumbuh 9,61% selama periode tahun 2008-2012. Sementara, antara tahun 2012 dan 2013 (Jan-Agustus) turun 10,50%, yang mana ekspor ke Amerika Serikat merosot 17,92%, Jepang (-21,99%), Federasi Rusia (-16,24%), Thailand (-46,25%), Korea Selatan (-16,42%), dan ke negara-negara lainnya Tumbuh 20,19% (Statistik Perdagangan, 2013).

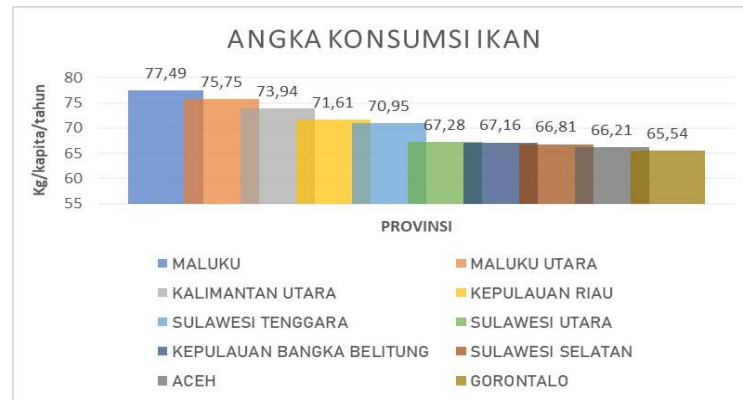


Sumber : BPS diolah Ditjen PDS - KKP (479 kode HS 2017 dan 507 kode HS 2022 Produk Perikanan

Gambar 1.2. Nilai Ekspor Impor produk perikanan indonesia Periode

Januri-Juli 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor perikanan di Indonesia mencapai nilai tertinggi Pada tahun 2021 sebanyak 5,71% dan ekspor terendah terdapat pada tahun 2022 dengan mencapai 3,57%. Selanjutnya nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 3,57 Miliar atau setara dengan Rp. 53,50 Triliun atau naik 18,16% dibanding periode yang sama tahun 2021



Sumber : Statistik KKP.go.id, 2021

Gambar 1.3. Sepuluh Provinsi Dengan Angka Konsumsi Ikan Tertinggi Tahun 2021

Sepuluh provinsi terbesar berdasarkan nilai ekspor pada tahun 2020 adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Utara. Jawa Timur merupakan provinsi asal hasil perikanan dengan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2020, dengan nilai sebesar USD 1.617.497.078. Berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan periode 2016-2020, provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,18%, DKI Jakarta naik sebesar 7,19%, Sumatera Utara naik sebesar 8,29%, Sulawesi Selatan naik sebesar 9,94%, Banten naik sebesar 12,28%, Lampung naik sebesar 0,15%, Jawa Barat naik sebesar 24,38%, Jawa Tengah naik sebesar 4,59%, Bali turun sebesar 1,23%, Kalimantan Utara naik sebesar 11,04%,

dan provinsi lainnya naik sebesar 7,29% per tahun. Nilai ekspor hasil perikanan menurut provinsi asal tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Nilai Ekspor Menurut Provinsi Asal Tahun 2016-2020

No	Provinsi Asal	2016	2017	2018	2019	2020	TREND (%)
1	Jawa Timur	1.429.714.058	1.452.494.679	1.553.779.869	1.542.453.327	1.617.497.078	3,18
2	DKI Jakarta	831.891.821	820.178.226	905.826.064	975.891.419	1.092.857.305	7,19
3	Sumatera Utara	310.259.272	365.592.371	364.306.095	372.527.761	422.474.400	8,29
4	Sulawesi Selatan	241.759.883	235.539.179	300.439.576	350.775.845	343.794.217	9,94
5	Banten	206.701.240	232.510.735	251.361.278	269.782.174	326.949.884	12,28
6	Lampung	263.798.093	237.602.427	234.187.655	191.280.127	249.180.601	0,15
7	Jawa Barat	122.671.052	255.595.850	244.209.527	245.839.596	228.480.024	24,38
8	Jawa Tengah	192.865.813	241.493.913	260.441.176	244.736.638	223.543.878	4,59
9	Bali	146.688.109	155.592.855	178.405.786	152.887.266	135.514.340	-1,23
10	Kalimantan Utara	93.271.209	123.216.556		170.786.462	129.131.884	11,04
11	Lainnya	332.622.078	404.599.458	409.121.882	419.004.185	435.790.399	7,29
	Total	4.172.242.627	4.524.416.249	4.860.903.582	4.935.964.801	5.205.214.009	5,72

Sumber : Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap total volume hasil perikanan sebesar 28,46%, DKI Jakarta sebesar 22,91%, Sulawesi Selatan sebesar 11,49%, Sumatera Utara sebesar 9,27%, Jawa Barat sebesar 5,99%, dan provinsi lainnya sebesar 21,89%. Berdasarkan total nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020, provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 31,07%, DKI Jakarta sebesar 21,00%, Sumatera Utara sebesar 8,12%, Sulawesi Selatan sebesar 6,60%, Banten sebesar 6,28%, dan provinsi lainnya sebesar 26,93%.

Pada prinsipnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) menggambarkan kondisi daya beli para pelaku usaha di sektor perikanan. Nilai NTN-NTPI diperoleh dengan membandingkan besaran indeks yang diterima nelayan (IT) dengan indeks yang dibayarkan nelayan (IB). IT digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas perikanan yang dihasilkan nelayan, sedangkan IB digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa

yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan. Perhitungan IT dan IB mempertimbangkan asumsi bahwa kuantitas dan jenis barang yang diperbandingkan tidak mengalami perubahan dari tahun dasar.

Cara interpretasi angka NTN dan NTPI pada suatu periode adalah jika indeks nilainya di atas 100. Hal ini berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga posisi daya beli pelaku usaha sektor perikanan relatif lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha sektor lain yang produknya dikonsumsi oleh para pelaku di sektor perikanan. Jika perubahan harga produksi sama dengan persentase perubahan harga barang konsumsi, sehingga pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Jika bernilai di bawah 100. Hal ini berarti bahwa harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, sehingga posisi daya beli para pelaku usaha di sektor perikanan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha di sektor lain yang produknya dikonsumsi oleh nelayan dan pembudidaya ikan.

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional dipengaruhi oleh perkembangan NTN Provinsi. NTN provinsi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2. Perkembangan NTN Tahun 2019-2021 dengan Tahun Dasar 2018

No	Provinsi	2019	2020	2021
1	Aceh	100,03	97,48	105,27
2	Sumatera Utara	100,86	99,52	106,18
3	Sumatera Barat	98,28	98,10	100,90
4	Riau	99,34	99,49	103,91
5	Jambi	104,20	107,31	113,65
6	Sumatera Selatan	96,78	100,36	104,67
7	Bengkulu	97,23	94,29	100,89
8	Lampung	101,23	101,34	105,72
9	Kep. Bangka Belitung	103,01	105,57	111,24
10	Kep. Riau	101,32	103,56	109,51
11	DKI Jakarta	98,21	95,19	97,83
12	Jawa Barat	100,02	99,39	108,86
13	Jawa Tengah	99,88	102,71	108,45

14	DI Yogyakarta	101,98	106,65	115,83
15	Jawa Timur	98,44	95,77	101,11
16	Banten	101,28	98,73	100,99
17	Bali	98,77	99,27	100,20
18	Nusa Tenggara Barat	102,85	104,89	112,11
19	Nusa Tenggara Timur	96,07	94,20	92,55
20	Kalimantan Barat	101,99	102,12	106,45
21	Kalimantan Tengah	102,11	102,38	102,47
22	Kalimantan Selatan	102,46	99,83	98,86
23	Kalimantan Timur	101,66	103,17	103,01
24	Kalimantan Utara	104,83	102,85	104,15
25	Sulawesi Utara	100,51	100,83	106,45
26	Sulawesi Tengah	96,10	98,11	103,27
27	Sulawesi Selatan	98,91	99,64	107,43
28	Sulawesi Tenggara	98,39	97,45	101,63
29	Gorontalo	94,64	95,24	96,05
30	Sulawesi Barat	99,42	99,23	106,27
31	Maluku	103,33	101,27	107,15
32	Maluku Utara	100,03	97,30	104,49
33	Papua Barat	97,61	95,57	93,69
34	Papua	107,08	110,52	111,59

Sumber : Analisis Indikator Kinerja Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Kurun Waktu 2018-2021

Pada dua tahun awal sejak menggunakan tahun dasar 2018, Provinsi Papua memperoleh nilai NTN tertinggi yaitu 107,08 pada tahun 2019 dan 110,52 Pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 NTN tertinggi diperoleh oleh Provinsi DI Yogyakarta. Namun, terdapat beberapa provinsi yang selama tiga tahun berturut-turut mengalami defisit, di antaranya DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sektor perikanan menurut provinsi di tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dan peningkatan di tiap provinsi, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut.

Harga sektor perikanan adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang

Maluku	4.751	5.029	5.347	5.775	5.941	6.214	5,53	4,60
Maluku Utara	2.162	2.369	2.691	2.963	2.937	3.184	8,16	8,41
Papua Barat	3.833	4.268	4.430	4.768	4.801	4.861	4,94	1,25
Papua	8.880	9.167	9.902	10.171	10.087	10.606	3,66	5,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Terdapat D.I Yogyakarta mengalami harga sektor perikanan yang paling sedikit pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan tiap tahunnya sampai tahun 2021 dan diikuti oleh DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2016 dan mengalami sedikit kenaikan setiap tahunnya hingga ke tahun 2021. Terdapat di posisi Jawa Timur mengalami harga sektor perikanan paling tertinggi tiap tahunnya dan di susul oleh provinsi Sulawesi selatan mengalami peningkatan ditiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi perikanan cukup besar baik budidaya maupun perikanan tangkap. Seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki potensi perikanan budidaya, sedangkan perikanan tangkap khususnya perikanan tangkap di laut terdapat pada Kabupaten/Kota yang mempunyai garis pantai. Peran sub sektor perikanan terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Utara salah satunya dapat dilihat dari indikator produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Share PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB keseluruhan secara konteks menunjukkan sejauh mana sektor perikanan berperan dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah.

Potensi Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terdiri dari Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dimana Potensi Perikanan Tangkap terdiri Potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya terdiri Budidaya tambak 20.000 Ha dan Budidaya Laut 100.000 Ha, Budidaya air

tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan Pesisir Sumatera Utara mempunyai Panjang Pantai 1300 Km yang terdiri dari Panjang Pantai Timur 545 km, Panjang Pantai Barat 375 Km dan Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru Sepanjang 350 Km. Sedangkan wilayah pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah Pengembangan yang terdiri dari:

1. Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dimana Potensi Pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari Rumput Laut, Kerapu dan kakap, Budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, Lele, Patin, Gurame, Tawes dan Nilam. Budidaya Tambak yang terdiri dari Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng.

2. Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah Wilayah yang berada di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan Potensi Pengembangan

pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan. Budidaya air tawar yaitu Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame.

3. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Terdapat 11 Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Dimana potensi pengembangan di wilayah Timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau, Budidaya Tawar yaitu Mas, Nila, Lele, Patin, Gurame, Grass carp, Lobster air tawar, Bawal tawar dan Ikan hias, Budidaya Tambak yaitu Rumpun Laut, Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng, sedangkan Budidaya perairan umum yaitu Mas, Nila dll.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sumatera Utara sejalan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan juga agenda nawa cita, dimana aspek kemaritiman menjadi pondasi pembangunan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dimana pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan. Nelayan merupakan ujung tombak yang terlibat dalam aktivitas perekonomian di sub sektor perikanan. Tingkat kesejahteraan nelayan salah satunya diukur melalui nilai tukar nelayan yang menunjukkan kemampuan nelayan untuk mengakses kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Produksi Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Tahun	Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Nilai Tukar
	Tangkap (Ton)	Budidaya (Ton)	Nelayan
2013	553.311,0	193.756,60	91,74
2014	618.956,3	204.744,2	94,34
2015	579.752,4	211.457,0	96,74
2016	525.349,7	197.137,0	909,09
2017	528.381,14	223.604,95	101,44
2018	503.232,2	243.829,47	103,79

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023

Produksi perikanan dan nilai tukar nelayan di provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah naik turun disetiap tahunnya, produksi perikanan tangkap terdapat pada tahun 2017 mengalami peningkatan tinggi hingga mencapai 528.381.14, sedangkan produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2018 dengan jumlah 243.829.47 dan nilai tukar nelayan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 dengan jumlah 909.09.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Sumatera Utara memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar meliputi hasil perikanan

tangkap, perikanan tangkap perairan umum, perikanan budidaya, dan jasa lingkungan. Dukungan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Adanya peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan memberikan kepastian hukum lebih tinggi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.5. Jumlah Ekspor Perikanan di Sumatera Utara Menurut Negara Tujuan 2018-2022

Tahun	Berat Bersih (ton)					Jumlah
	Amerika Serikat	Tiongkok	India	Jepang	Lainnya	
2018	581 686	1 301 139	672 575	121 472	6 968 649	9 645 621
2019	585 646	1 603 686	814 343	116 004	6 409 501	9 529 180
2020	425 049	1 338 479	776 927	334 631	5 956 056	8 831 142
2021	379 954	1 507 946	638 734	585 848	6 357 363	9 469 844
2022	591 161	1 845 404	946 471	440 325	6 067 926	9 891 287

Sumber : BPS Statistik Sumatera Utara

Menurut tabel di atas dapat dilihat Negara Tiongkok menjadi negara terbesar melakukan pengiriman ekspor perikanan di tiap tahunnya. Pada tahun 2018 ekspor perikanan di Tiongkok dapat mencapai 1.301.139 Ton dan posisi kedua berada di Negara India dengan mencapai 672.575 Ton dan Negara Jepang memiliki sedikit pengiriman ekspor perikanan 121.472 Ton.

Secara umum potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya, potensi perikanan Samudera Hindia, jumlah nelayan dan kapal penangkapan ikan, fasilitas pendukung perikanan dan industri berbasis komoditi perikanan. Pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 813.720 Kilogram dan jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 41.457,70 Ton (sumber : BPS Statistik Pertanian Holtikultura SPH Dinas pertanian Tapanuli Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah).

Sub Sektor Perikanan selama tahun 2010-2016 mengalami Peningkatan dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 11,90% dan pada tahun 2016 Sebesar 13,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,56%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Triwulan Di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2021

Triwulan	Produksi (kg)
(1)	(2)
Triwulan I	201 150
Triwulan II	200 800
Triwulan III	209 600
Triwulan IV	202 170
2021	813 720

Sumber : BPS Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah 2022

Berdasarkan jumlah Produksi perikanan budidaya menurut triwulan pada tahun 2021 mengalami hasil produksi tidak menetap, triwulan 1 mengalami jumlah produknya tinggi hingga mencapai 201.150 akan tetapi pada triwulan ke 2 mengalami penurunan hingga mencapai 200.800 per kilogram nya.

Berikut ini perkembangan produksi ikan laut segar di kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.8. Produksi Ikan Laut di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Tahun produksi	Produksi (Ton)
1	2012	42.059,7
2	2013	42.297,5
3	2014	44.522,0
4	2015	44.948,7
5	2016	57.511,0
	Total Produksi	231.338,9

Sumber : BPS Perikanan, dan Kelautan Tapanuli Tengah, 2017

Dari data diatas dapat dijelaskan perkembangan ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun selalu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi yaitu sebesar 18.279,7 Ton atau 43,5%. Peningkatan produksi ikan laut segar tidak lepas dari kontribusi nelayan yang terus meningkatkan daya kerja

dalam menangkap ikan laut segar. Nelayan seseorang yang mata pencahariannya menangkap ikan, dan menjadikannya sebagai kegiatan utama dalam kehidupan sehari – hari. Nelayan merupakan garda terdepan dalam memproduksi ikan laut segar. Dalam kehidupan di era global ini kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan ikan laut segar yang semakin hari semakin meningkat tajam. Dengan meningkatnya permintaan ikan laut segar ini, diharapkan mampu menopang kehidupan perekonomian masyarakat nelayan yang ada di, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut ini dapat dilihat jumlah nelayan tangkap yang ada di, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan pemaparan diatas dan dilihat dari beberapa hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Potensi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan PDB kelautan dan perikanan mengalami cukup tinggi kontribusinya akan tetapi sangat minim terhadap PDB Nasional sehingga kurang bermanfaat sebagai indikator kerja utama sektor kelautan dan perikanan
2. Realisasi investasi Pemahaman Modal Asing (PMA) sektor perikanan faktanya masih sangat sedikit dilakukan, mengakibatkan kurangnya tingkat ekspor pada berbagai negara.

3. Kontribusi ekonomi Produk Domestik Bruto sektor kelautan dan perikanan sangat kecil
4. Sektor kelautan dan perikanan yang kontribusinya kecil dalam menyumbang BNP ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka batasan masalah diatas , maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dibatasi hanya tentang potensi sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada sektor perikanan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan penulis teliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah pada sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah pada sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai

Berikut :

1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu Pengetahuan khususnya mengenai Analisis Potensi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan Bagi pihak – pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2016) Menyatakan bahwa, Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.1.2. Tahap – Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (Sukirno, 2016) menyatakan bahwa, teori rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam tahap pertama yaitu masyarakat tradisional-perekonomian masih belum berkembang. Perubahan dari tahap pertama ke tahap kedua, menurut rostow, merupakan tahap dimana suatu negara mempersiapkan masyarakatnya untuk memulai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Berikut uraian dari tahap-tahap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

A. Masyarakat Tradisional

Menurut Rostow dalam suatu masyarakat tradisional tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas perpekerja masih sangat terbatas, oleh sebab itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor

pertanian. Dalam sektor ini struktur sosialnya sangat bersifat hirarkis, yaitu anggota masyarakat mempunyai kemungkinan yang sangat kecil sekali untuk mengadakan mobilitas secara vertikal. Maksudnya, kedudukan seseorang dalam masyarakat tak akan berbeda dengan kedudukan ayahnya, kakeknya, dan nenek moyangnya.

B. Tahap Prasyarat untuk Lepas Landas

Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai tahap suatu masa transisi pada ketika dimana suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya, atau dipersiapkan dari luar, untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Menurut Rostow pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara otomatis.

C. Tahap Lepas Landas

Rostow melanjutkan analisisnya mengenai tahap lepas landas dengan menganalisis sifat-sifat perubahan berbagai jenis kegiatan ekonomi di dalam masa tersebut. Ia membedakan suatu perekonomian menjadi tiga sektor pertumbuhan: sektor pertumbuhan primer, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan yang pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian; sektor pertumbuhan supplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer; dan sektor pertumbuhan terkait, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.

D. Tahap Sesudah Lepas Landas

Tahap pembangunan yang berikut adalah gerakan ke arah kedewasaan, yang diartikan oleh Rostow sebagai: masa di mana masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi moderen pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dalam tahap ini sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut, sektor-sektor pelopor baru akan muncul untuk menggantikan pelopor lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin pada tahap gerakan ke arah kedewasaan coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat tahap lepas landas yang berlaku, dan juga oleh bentuk kebijakan pemerintah.

E. Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap terakhir dalam teori pertumbuhan Rostow adalah tahap konsumsi tinggi, yaitu masa dimana perhatian masyarakat lebih menekankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Dalam tahap ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan dukungan politik yaitu : Pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri dan kecenderungan ini umumnya berwujud penaklukan negara-negara lain. Kedua, menciptakan Welfarestate, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk Dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan progresi. Ketiga, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti makan, pakaian, dan perumahan menjadi konsumsi barang-barang tahan lama dan mewah.

2.1.3. Ciri – Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, setidaknya ada enam ciri pertumbuhan ekonomi. Keenam ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita yang sangat cepat.
- b. Perkembangan produktivitas masyarakat.
- c. Pertumbuhan tingkat struktural yang melesat.
- d. Tingkat urbanisasi yang tinggi.
- e. Adanya ekspansi pada negara maju.
- f. Terjadi arus barang, modal dan manusia di berbagai Negara.

2.1.4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam. Yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama jika tidak didukung

oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Karena manusia adalah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. SDM adalah faktor terpenting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana SDM selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pertumbuhan ekonomi.

3. Akumulasi modal

Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Tenaga manajerial dan organisasi produksi

Lalu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah organisasi produksi dan tenaga manajerial. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

6. Faktor politik dan administrasi pemerintah

Dari sisi non ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah struktur politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi.

7. Aspek sosial budaya

Berikutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan

masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa arah penalaran dan skeptisisme menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru.

2.1.5. Subsektor Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada kondisi yang tertinggi yaitu Pada tahun 2013 sebesar 5,18%. Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi periode Tahun 2010-2016 sebesar 8,47% dengan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 13,46% kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berada pada urutan kedua sebesar 5,86%. Sementara Sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor dengan laju pertumbuhan terendah periode 2010-2016 dengan rata-rata sebesar 3,19% dan Sektor Industri Pengolahan berada di urutan kedua terendah dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,65%.

2.2. Pengertian Pendapatan Nasional

Dikutip dari e-modul Ekonomi Kemendikbud pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal disuatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional.

2.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional

a. Keseluruhan Permintaan dan Penawaran (Aggregate Demand And Supply)

Keseluruhan Permintaan (Aggregate Demand) adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan Keseluruhan Penawaran (Aggregate Supply) adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu.

b. Investasi

Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu.

c. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional.

2.2.2. Konsep Yang Berkaitan Dengan Pendapatan Nasional

Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yakni sebagai berikut:

1. Gross Domestic Product (GDP)/Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai barang dan/atau jasa suatu Negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga Negara tersebut dan warga Negara asing yang tinggal di negara tersebut.

2. Gross National Product (GNP)/Produk Nasional Bruto (PNB)

GNP/PNB adalah nilai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga Negara yang tinggal di dalam negeri dan yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut.

GNP di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GNP} = \text{GDP} + (\text{PFLN} - \text{PFDN})$$

Keterangan :

GNP = Gross National Product

GDP = Gross Domestic Product

PFLN = Pendapatan Faktor Produksi warga negara di Luar Negeri

PFDN = Pendapatan Faktor Produksi Asing di Dalam Negeri

3. Net National Product (NNP)/ Produk Nasional Neto (PNN)

NNP/PPN adalah nilai barang yang didalamnya mengandung nilai depresiasi (penyusutan) karena harus mengganti barang modal yang sudah asing dan/atau menambah stok. NNP dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depresiasi (Penyusutan)}$$

4. Net National Income (NNI)/ Pendapatan Nasional Neto (PN)

NNI/PN adalah pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung di tambah subsidi. NNI dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung} + \text{Subsidi}$$

5. Personal Income (PI)

Pendapatan Perorangan adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang di peroleh tanpa melakukan pekerjaan. PI dapat di hitung dengan rumus berikut :

$$PI = (NNI + \text{Transfer Payment}) - (\text{Laba di tahan} + \text{Iuran Asuransi} + \text{Pajak Perseorangan} + \text{Iuran Jaminan Sosial}).$$

6. Disposibel Income (DI)/ Pendapatan Disposibel

DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan/atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$$

2.2.3. Manfaat Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan pokok bahasan yang menarik karena sangat erat hubungan kesejahteraan dan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan kemajuan perekonomian Negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun. Karenanya, kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi.
2. Menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.
3. Sebagai pedoman merumuskan kebijakan Pemerintah. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian

4. Mengetahui dan menelaah susunan atau struktur Perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris.
5. Membandingkan perekonomian antar daerah atau Antar negara
6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per Kapita

2.2.4. Komponen Pendapatan Nasional

Komponen pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan perhitungannya. Pada pembahasan ini kita akan melihat komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran.

A. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi untuk pekerja (Compensation for employees)
2. Keuntungan perusahaan (Corporate profits)
3. Pendapatan usaha perorangan (sole proprietor's income)
4. Pendapatan sewa (Rental income of person)
5. Bunga neto (Net interest)

B. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan atau konstruksi

6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa lain

C. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Pengeluaran investasi
3. Tabungan
4. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa

2.2.5. Pengukuran Potensi Sektor Perekonomian

Pengukuran potensi sektor perekonomian menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Location Quotient (LQ) adalah perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2014: 82). Sektor industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor pertambangan dan penggalan secara nasional dan waktu perbandingan juga harus sama.

Analisis Location Quotient (LQ) umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu Nasional adalah daerah yang lebih luas. Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan, 2014: 82-83):

- a. $LQ > 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah dari pada nasional.

- b. $LQ < 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah dari pada nasional.
- c. $LQ = 1$, artinya peranan sektor tersebut sama baik di daerah ataupun secara nasional.

Analisis shift-share adalah salah satu analisis yang sederhana dengan menggunakan konsep proporsi dan pertumbuhan dimana kita dapat melihat sektor-sektor apa saja disuatu daerah yang lebih unggul dibandingkan daerah yang lain. Analisis shift share memiliki tiga komponen (Tarigan, 2017) yaitu: National Share, Proportional Shift, Differential. Shift.

1. National Share merupakan pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi dari provinsi tertentu. Jika sektor tertentu pada provinsi tersebut memiliki pertumbuhan yang positif maka Nilai N untuk daerah objek yang dianalisis akan positif. Jika sektor tertentu negara tersebut memiliki pertumbuhan negatif maka nilai N untuk daerah objek yang dianalisis akan negatif juga.
2. Proportional Shift component (P) kadang – kadang dikenal sebagai komponen struktural atau industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industrial di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor – sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah –daerah yang berspesialisasi dalam sektor – sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.
3. Different Shift Componen (D) kadang – kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur

besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor – sektor industry tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor – faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai different shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Ketiga proyeksi tersebut bisa digabung dalam bentuk proyeksi langsung

$$E_{r,i,t+m} = \left(1 + \frac{EN_{i,t+m} - EN_{i,t}}{EN_{i,t}} \right)^m + \frac{Dr_{i,t}}{Er_{i,t-n}}$$

Keterangan :

E = Employment atau banyaknya lapangan kerja

r = Region atau wilayah analisis

i = Sektor Industri

t - n = Tahun awal

t = Tahun

N = National atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi
jenjangnya

2.2.6. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan Cold Storage 1.000 ton yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tak hanya *cold storage* 1.000 ton, terhubung melalui video conference ke

berbagai daerah lainnya, Menteri Susi juga meresmikan secara serentak 15 pembangunan prioritas kelautan dan perikanan lainnya dengan menandatangani prasasti digital.

Selain cold storage 1.000 ton, pembangunan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Pemilihan lokasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Provinsi DKI Jakarta bukan tanpa alasan. PPS Nizam Zachman merupakan pelabuhan perikanan yang menjadi pusat produksi ikan dan tujuan pendaratan ikan dari sentra-sentra produksi ikan di wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Selain itu, PPS Nizam Zachman juga merupakan pusat distribusi ikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas penyimpanan yang memadai dan mampu menjawab kebutuhan pasar.

Selain cold storage, untuk memelihara sistem rantai dingin, KKP juga telah menyerahkan bantuan lebih dari 600 unit ice flake machine ke berbagai sentra-sentra penangkapan ikan di Indonesia.



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia

Gambar 2.4. Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan 2017-2018

Pembangunan cold storage ini dianggap strategis untuk mengimbangi peningkatan produksi perikanan Indonesia yang terus terjadi dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan KKP. Seperti pada 2018, produksi perikanan Indonesia meningkat 1,41% menjadi 24,49 juta ton dari sebelumnya di 2017 sejumlah 24,15 juta ton. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan sektor tangkap maupun budidaya yang masing-masing berkontribusi 1,64% dan 1,53%.

2.2.7. Kebijakan dan Tindakan Larangan Kelautan

Pada masa menteri Susi memang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets). Tujuannya untuk mengajak nelayan melakukan penangkapan produk laut secara ramah lingkungan. Munculnya pelarangan atas alat tangkap ikan Trawl di Indonesia pertamakalinya dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaringan trawl. Namun di sisi lain alat tangkap ini merupakan alat yang paling sering digunakan oleh nelayan di beberapa daerah

karena pengoprasian trawl menjadi alat tangkap yang sangat efisien dibandingkan dengan alat tangkap lainnya.

Pengaturan hukum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) terdapat perkembangan jenis-jenis alat penangkapan ikan dari jaring trawl, yaitu adanya klasifikasi alat tangkap yang dilarang berupa alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, dengan jenis-jenis alat tangkapnya serta spesifikasi alat tangkap yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1) Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls)

a) Pukat Hela Dasar (bottom trawls)

1. Pukat Hela Dasar Berpalang (beam trawls)
2. Pukat Hela Dasar Berpapan (otter trawls)
3. Pukat Hela Dasar Dua Kapal (pair trawls)
4. Nephrops Trawls; dan
5. Pukat Hela Dasar Udang (shrimp trawls), berupa pukat udang

b) Pukat Hela Pertengahan (midwater trawls)

1. Pukat Hela Pertengahan Berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan
2. Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (pair trawls)
3. Pukat Hela Pertengahan Udang (shrimp trawls)

- c) Pukat Hela Kembar Berpapan (otter twin trawls) d) Pukat Dorong
- 2) Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik (seine nets) a) Pukat Tarik Pantai (beach seines) b) Pukat Tarik Berkapal (boat or vessel seines).
1. Dogol (danish seines)
 2. Scottish seines;
 3. Pair seines;
 4. Payang
 5. Cantrang
 6. Lampara Dasar

Melihat tujuan perubahan Peraturan Menteri yang kembali didasarkan pada alasan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Berbagai perkembangan pengaturan tersebut, pada dasarnya menggambarkan adanya suasana tarik-menarik antara kepentingan hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan bahkan ekologi. Namun sayangnya penulis berpendapat bahwa sangat dimungkinkan aturan ini kembali tidak berjalan. Melihat pertimbangan pembuatan Peraturan Menteri yang sejak tahun 1980 hingga tahun 2015 tidak banyak mengalami perkembangan. Apabila Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) kembali tidak berjalan maka dalam hal ini lagi-lagi hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai kerangka

ideologis perubahan struktur dan kultur yang didalamnya terdapat fungsi pengayoman yang tercakup empat fungsi yaitu:

1. Menjamin keamanan dan ketertiban (kestabilan nasional)
2. Menunjang pembangunan sosial
3. Menjamin keadilan
4. Mendidik masyarakat ke arah sikap sosial yang diharapkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

2.3. Pengertian Potensi Subsektor Perikanan

Menurut (Rokhmin, 2014) sektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budi daya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau, dan air tawar. Sumber perikanan dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran.

Pengembangan sektor perikanan merupakan pembangunan seluruh aspek yang mencakup pembangunan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan terutama nelayan, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perikanan seperti pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan lain-lain. Sektor perikanan adalah salah satu sektor andalan yang dijadikan pemerintah sebagai salah satu potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal, regional maupun negara. Sektor ini merupakan sektor yang selama ini

belum dieksploitasi secara maksimal dan seringkali dianggap bagian dari sektor pertanian, padahal sebagai suatu negara maritim Indonesia memiliki gugusan ribuan pulau yang lebih dari 70% wilayahnya terdiri dari lautan, belum lagi potensi akan perairan tawar yang sangat banyak khususnya di beberapa pulau besar. Subsektor Perikanan Budidaya memiliki peran strategis menjadi salah satu penopang utama pemenuhan kebutuhan pangan nasional, seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

Sektor perikanan bertujuan untuk menjadi indikator pembangunan ekonomi, baik secara makro atau nasional maupun mikro. Secara makro sektor perikanan menjadi penyumbang devisa dengan kegiatan ekspor. Secara mikro sektor perikanan memberi dampak penyediaan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, seiring dengan peningkatan pendapatan para pelaku usaha di bidang perikanan. Keberhasilan perkembangan produksi perikanan dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan, baik melalui dukungan pemerintah maupun kontribusi masyarakat nelayan.

Di Indonesia, pembangunan diartikan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia merupakan bagian integral dari negara dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus berdampak pada pembangunan daerah. Rencana pembangunan Indonesia sebagai negara kesatuan meliputi rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan tingkat daerah. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

2.3.1. Pembagian Sektor Perikanan

Secara umum jenis perikanan dan persebarannya dapat kita golongkan menjadi 3 macam, yakni:

1. Perikanan Pantai

Perikanan jenis ini dilakukan pada daerah kurang dari 60 mil dari bibir pantai. Biasanya pemanfaatan sumber daya jenis perikanan ini dilakukan oleh para nelayan tradisional dengan menggunakan perahu motor ukuran kecil, atau perahu dayung. Oleh karena luas daerah tangkapannya relatif sempit dan hanya menggunakan peralatan tradisional, maka hasil tangkapannya pun kurang maksimal dan faktor cuaca juga sangat mempengaruhi. Jenis ikan yang sering ditangkap, antara lain kembung, teri, petek, lemuru, dan beberapa jenis moluska, seperti cumi dan ubur-ubur.

2. Perikanan Laut Dalam

Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan yang dilakukan di samudera atau di laut lepas. Biasanya yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan jenis ini dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan perikanan besar yang tentunya menggunakan peralatan canggih. Hasil tangkapan ikannya pun bisa dalam jumlah besar.

Beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial antara lain sebagai berikut:

- a. Selat Malaka, biasanya terdapat banyak ikan terumbuk.
- b. Perairan utara Jawa dan segara anak (Cilacap) banyak terdapat rumput laut.
- c. Daerah Bitung, Air tembaga dan Sulawesi utara banyak terdapat ikan tuna dan cakalang.

- d. Maluku, terdapat banyak jenis ikan hias, rumput laut dan cakalang.
- e. Sekitar kepulauan Aru dan Kei terdapat banyak mutiara, rumput laut, bunga karang, tripang dan rumput laut.

Selain daerah di atas terdapat banyak pula jenis ikan dan sumber daya alam laut yang banyak, tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Merauke, Papua.

3. Perikanan Darat

Selain perikanan laut, di Indonesia juga mengenal perikanan darat yang dilakukan di air tawar dan air payau. Pengelolaan dan pembudidayaan ikan biasanya dilakukan di daerah sungai, danau, empang atau kolam, sawah dan bendungan. Jenis hasil budidayanya sangat beragam seperti udang, lobster, ikan lele, nila, gurameh, bawal, belut dll.

2.3.2. Manfaat Potensi Subsektor Perikanan

Badan Pusat Statistik mencatat, subsektor perikanan budidaya punya peluang besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Manfaat Ekonomi Perikanan Bagi Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak pulau kecil besar. Dengan wilayah yang terdiri dari daratan, dan duaper tiga dikelilingi oleh perairan atau lautan. Karena itulah Indonesia disebut sebagai Negara Kepulauan. Berikut beberapa manfaat ekonomi sektor perikanan :

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Ikan merupakan lauk sumber protein hewani yang baik bagi perkembangan tubuh manusia. Juga mengandung omega 3 yang baik bagi perkembangan otak manusia.

Sehingga keberadaannya sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi tersebut. Demi generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar.

2. Memberikan penghasilan bagi masyarakat terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Masyarakat di daerah pesisir atau perairan mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil menangkap ikan (nelayan). Mereka menangkap ikan dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Menaikkan derajat ekonomi rakyat. Penghasilan yang diperoleh masyarakat dari penjualan ikan adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jika penjualan tersebut memberikan hasil yang besar, akan terjadi lonjakan pemenuhan kebutuhan. Dari pemenuhan kebutuhan primer, menjadi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Hal ini dikarenakan derajat ekonomi yang meningkat.
4. Membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi rakyat yang baik (pada poin 3) secara otomatis memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang baik pula.
5. Membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok (ekspor) perikanan. Seperti halnya masyarakat Indonesia, dunia pun membutuhkan ikan untuk memenuhi pangan dan gizinya. Jika di dalam negeri tidak tercukupi, tentu mereka akan berkumpul. Di sinilah kesempatan baik Indonesia untuk menyediakan (mengeksportir).
6. Meningkatkan devisa negara. Dari hasil ekspor perikanan pada poin 5 (lima) secara otomatis akan memberikan (meningkatkan) devisa bagi negara.

2.3.3. Rencana Pembangunan Sektor Perikanan

Dikutip dari KKP ada Lima program strategis KKP yakni memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan ramah lingkungan, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut, bulan cinta laut untuk mengatasi masalah sampah di laut

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada prinsip ekonomi biru atau prinsip berkelanjutan. “Tujuan pembangunan sektor kelautan perikanan tidak hanya melihat dari sisi ekonomi tetapi juga berlandaskan pada keberlanjutan sumberdaya.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan perikanan lainnya, menghasilkan produk dan jasa kelautan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan perikanan bagi perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatkan konsumsi ikan, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam kelautan perikanan, meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor kelautan perikanan yakni meningkatkan inovasi teknologi dan manajemen profesional, meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan

perikanan yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.3.4. Kebijakan Pemerintah Mengenai Sektor Perikanan Di Indonesia

Sumber daya ikan di perairan Indonesia merupakan salah satu modal menuju kemakmuran bagi bangsa, apabila dikelola secara berkelanjutan. Menurut Menteri Trenggono merinci, perolehan PNBP sementara sebesar Rp1,79 triliun berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) perikanan sebanyak Rp1,1 triliun, non-SDA Rp611,8 miliar, serta BLU Rp44,3 miliar. Perolehan ini mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999. Sedangkan volume produksi perikanan sampai triwulan III tahun 2022 mencapai 18,45 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan sebanyak 5,97 juta ton, hasil perikanan budidaya 5,57 ton, dan rumput laut sebanyak 6,9 juta ton.

KKP mengusung lima program ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Program yang mencakup hulu hingga hilir tersebut berupa perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Trenggono menambahkan, program ekonomi biru belum seluruhnya berjalan di sepanjang tahun 2022. Untuk itu, pihaknya mengupayakan seluruh program dapat diimplementasikan di tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional, serta menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan. Membuat sebuah kebijakan dan menerapkannya karena

menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia yang begitu luas, tidaklah mudah. Yang kita sampaikan dan belum terimplementasi itu bagian dari sosialisasi, kita masih terus menyiapkan proses di balik itu sebagai payung hukum yang clear dan jelas. Pada intinya kami mengelola sektor kelautan dan perikanan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuktikan tahun 2022 sebagai momentum akselerasi. Hasilnya, KKP mencatat peningkatan nilai ekspor perikanan 10,66% pada periode Januari – November 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun nilai ekspor perikanan periode Januari-November 2022 mencapai USD5,71 miliar. Sementara nilai impor di periode yang sama hanya USD0,64 miliar. Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai USD1.997,49 juta, Tuna-Cakalang-Tongkol senilai USD865,73 juta, Cumi-Sotong-Gurita sebesar USD657,71 juta, Rumput Laut sebesar USD554,96 juta dan Rajungan-Kepiting sebesar USD450,55 juta. Komoditas-komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat senilai USD2,15 miliar (37,63%), Tiongkok USD1,02 miliar (17,90%), Jepang USD678,13 juta (11,89%), Asean USD651,66 juta (11,42%) serta 27 negara Uni Eropa senilai USD357,12 juta (6,26%).

Selain mencatatkan prestasi di sisi makro, KKP juga menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan, pembudidaya, serta nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan pencairan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp9,02 triliun per November 2022 dan ditargetkan akan mencapai Rp9,7 triliun di penghujung tahun. Alhasil, 38,6% pelaku usaha bisa menambah tenaga kerja baru setelah memperoleh pemodalannya dari KUR. Lalu

83,16% pelaku usaha bisa meningkatkan volume produksinya dan 90,08% pelaku usaha berhasil meraih peningkatan omset perbulannya.

2.3.5. Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang banyak mendapatkan perhatian oleh pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan adalah ekspor dan impor. Pengertian ekspor adalah pembelian barang dan jasa domestik oleh pihak asing (Hersey, P., & Blanchard, 2016) dan ekspor memiliki peranan penting dalam suatu sistem perekonomian Indonesia karena ekspor menggambarkan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia, dijual ke luar negeri, dan dihitung sebagai pendapatan Indonesia (Richard, G., & Lipsey, 2016). Ekspor hasil perikanan menunjukkan hasil serapan produk dalam negeri yang digunakan oleh konsumen di luar negeri, artinya semakin besar volume dan nilai ekspor hasil perikanan yang dicapai maka semakin besar pula penyerapan produk hasil perikanan di luar negeri. Semakin besar penyerapan produk hasil perikanan di luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Impor adalah pembelian barang dan jasa asing oleh konsumen, perusahaan dan pemerintah dalam negeri (Hersey, P., & Blanchard, 2016)⁴). Impor hasil perikanan menunjukkan hasil yang menggambarkan volume dan nilai serapan masyarakat Indonesia atas komoditas perikanan dari luar negeri. KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) telah menetapkan kebijakan bahwa persentase nilai impor hasil perikanan pada suatu periode tidak boleh melebihi 20 persen dari total nilai

ekspor, dengan memperhatikan standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri.

Ekspor-impor merupakan instrumen perdagangan internasional. Landasan ekonomis yang paling fundamental bagi terselenggaranya perdagangan internasional bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki persediaan sumber daya, pilihan dan teknologi, skala ekonomi dan pembangunan yang berbeda satu sama lain. Dalam perkembangannya, perdagangan internasional tidak hanya didasarkan pada keunggulan sumber daya (keunggulan komparatif), namun juga berdasarkan daya saing atau kemampuan menghasilkan barang dan jasa dengan efisiensi yang lebih baik (keunggulan kompetitif). Dengan demikian, kegiatan ekspor impor tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan kelebihan sumber daya saja, namun juga dapat dilakukan berdasarkan efisiensi dalam menghasilkan barang dan jasa.

Neraca perdagangan hasil perikanan tahun 2021 mencapai surplus US\$ 5,2 miliar dengan nilai ekspor mencapai US\$ 5,7 miliar dan nilai impor mencapai US\$ 499 juta. Neraca perdagangan hasil perikanan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen dibandingkan tahun 2020, dengan perincian nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 9,8 persen dibandingkan tahun 2020 dan nilai impor mengalami kenaikan sebesar 16,7 persen dibandingkan tahun 2020.

2.4. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga menggunakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian yang dikaji oleh peneliti. Hasil penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini :

No	peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	(Wijaya, 2022)	Analisis potensi sektor ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen)	Metode Kuantitatif	Menganalisis potensi masing – masing sektor ekonomi dengan mengambil sektor apa saja yang basis dan yang relative tumbuh cepat dalam potensi sektor ekonomi.
2	(Tibarani, 2018)	Peranan Subsektor perikanan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Metode Kualitatif	Menganalisis kontribusi subsektor perikanan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta kedudukan atau tingkat basis dan non basis ekonomi subsektor perikanan dan pembangunan dalam pembangunan wilayah. Multiplier effect subsektor perikanan terhadap PDRB wilayah dan kesempatan kerja Kabupaten Kampar.
3	(Gaurahman, 2020)	Analisis Pengaruh Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika	Metode Asosiatif dan Deskriptif	Sektor Perikanan merupakan sektor yang memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika tiap tahunnya. Produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Walaupun sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Mimika tidak sebesar sektor lainnya, akan tetapi dengan potensi yang dimiliki diharapkan mampu menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Semakin banyaknya produksi perikanan maka akan mampu meningkatkan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Mimika.
4	(Pradana, 2019)	Peluang Dan Tantangan Subsektor Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Provinsi Banten	Metode Kualitatif	Mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh subsektor perikanan dalam menopang perekonomian Provinsi Banten melalui telah terhadap perkembangan subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya dan faktor yang memengaruhinya.
5	(Maulidia, 2018)	Analisis Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	Metode Regresi Linear Berganda	Sebagai sektor unggulan dalam perekonomian, perikanan akan sangat penting untuk dikembangkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Salah satu penunjuk tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah ditunjukkan pada ukuran PDRB perkapita yang menjelaskan besarnya pendapatan rata-rata yang mungkin dicapai masyarakat.
6	(Ameriyani,	Perencanaan	Metode	Sebuah perkembangan yang belum

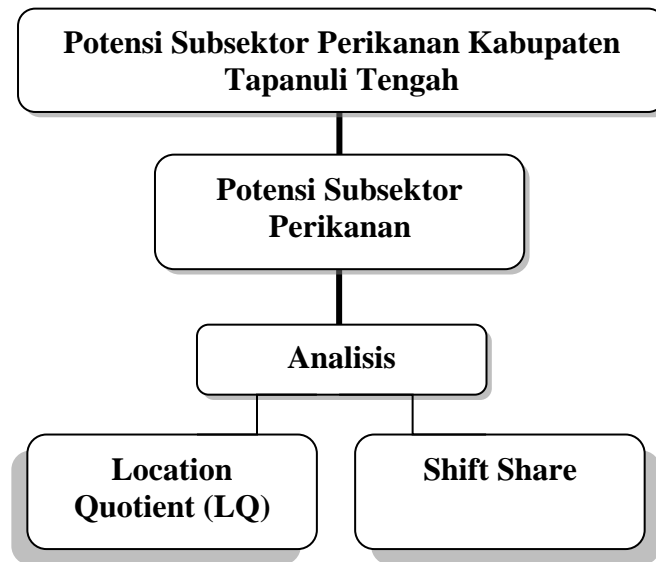
	2014)	Pengembangan Subsektor Perikanan Laut di Lima Kecamatan di Kabupaten Rembang	Kuantitatif	dikelola perikanan laut dan tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Rembang, perlu untuk merencanakan pengembangan perikanan laut sub-sektor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, untuk mengetahui komoditas potensial yang akan dikembangkan, untuk mengetahui daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang lengkap yang akan direkomendasikan sebagai pusat manufaktur, untuk mengetahui perencanaan dan pengembangan perikanan laut sub-sektor Kabupaten Rembang.
--	-------	--	-------------	---

Perbedaan hasil penelitian yang ditulis dengan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian, dapat juga dilihat dari judul masing – masing dimana peranan, peluang dan tantangan, analisis dan perencanaan yang digunakan oleh penelitian terdahulu sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih dominan pada subsektor perikanan di daerah.

Sedangkan persamaan hasil penelitian yang ditulis dengan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat adanya persamaan dalam menganalisis subsektor perikanan di suatu daerah.

2.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah bentuk gambar dimana menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dependen terhadap variabel independen. Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang. Kerangka konseptual dapat dilihat pada digambar berikut.



Gambar 2.5. Kerangka Konseptual

Potensi Subsektor Perikanan kabupaten tapanuli tengah merupakan analisis luas dalam penelitian ini yang di rangkum kembali menjadi potensi Subsektor perikanan dan analisis yang di kumpulkan. Menggunakan Location Quotient (LQ) dan Shift Share untuk menghasilkan jumlah penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Menurut (Saefullah, 2018) metode penelitian normatif dimana akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang berkenaan dengan hukum perikanan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyusun fakta kelautan dan perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pusat Badan Statistik (BPS).

3.1.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari Maret 2023 sampai Juli 2023, untuk lebih jelasnya tentang waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Jadwal Kegiatan Penelitian

N O	Aktivitas Penelitian	Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan (prariset)	■	■																						
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
3	Pembimbing an Proposal									■	■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal																■								

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

A. Dokumentasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau metode kepustakaan dimana cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, dan terutama berupa arsip juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Potensi Subsektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, menggunakan data berupa angka atau nilai, yang kemudian dievaluasi dengan menambahkan informasi berupa frase untuk menjelaskan data kualitatif menggunakan metode Location Quotient (LQ), dan analisis shift share, yang berupa dokumentasi yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

4.1.1. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut dan terletak pada koordinat $1^{\circ}11'00''$ - $2^{\circ}22'0''$ LU dan $98^{\circ}07'$ - $98^{\circ}12'$ BT dengan batas-batas wilayah pada sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia. Batas wilayah kabupaten tapanuli tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Timur : Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh)

Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 Km² 3,06 persen luas Provinsi Sumatera Utara dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah \pm 4.000 km², sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah \pm 6.194,98 km². Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan

Kolang yakni 400,65 km² (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99 persen).

Jumlah pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 32 (tiga puluh dua) pulau yang hanya sebagian kecil dihuni oleh penduduk. Sebaran ke-32 pulau tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Barus terdapat 2 pulau, Kecamatan Sorkam 1 pulau, Kecamatan Badiri 3 pulau, Kecamatan Tapian Nauli 20 pulau, Kecamatan Manduamas 4 pulau, Kecamatan Sosorgadong 1 pulau, dan Kecamatan Pandan 1 pulau.



Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbentuk pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Pandan. Pada bulan Mei 2007, secara administratif pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 19 kecamatan, 24 kelurahan dan 154 desa, yaitu meliputi kecamatan Manduamas, sirandorung, Andam Dewi, Barus Utara, Sosorgadong, Sorkam Barat, Sorkam, Pasaribu Tobing, Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, Pandan, Tukka, badiri, Lumut, Sibabangun dan Sukabangun.

Pada bulan Desember 2007 jumlah Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah bertambah satu lagi yaitu Kecamatan Sarudik sehingga jumlah Kecamatan seluruhnya adalah 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sampai sekarang. Pemekaran Kecamatan tersebut dimaksudkan untuk lebih mempercepat proses pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan serta pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

4.1.2. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit–bukit dengan ketinggian 0 – 1.266 meter di atas permukaan laut. Dari seluruh wilayah Tapanuli Tengah, 43,90% berbukit dan bergelombang.

4.1.3. Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong beriklim tropis. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2005 adalah 26,09 °C. Dalam periode bulan Januari – Desember 2006, suhu udara maksimum dapat mencapai 31,53 °C dan suhu minimum mencapai 21,72 °C. Pada tahun 2006, curah hujan rata-rata 4.925,9 mm, hari hujan 226,0 hari, kecepatan angin rata-rata 6,7 knot dan penguapan rata-rata 4,6 mm. Kelembaban udara rata-rata 84,58%.

Perekonomian Tapanuli Tengah pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan di Tapanuli Tengah tahun 2022 mencapai 4,18 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2022

pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan akibat pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 11,77 persen, lapangan usaha lain yang pertumbuhannya terbesar adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,91 persen, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 7,74 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,70 persen. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,02 persen, industri pengolahan sebesar 1,87, dan konstruksi sebesar 3,01 persen.

4.1.4. Kondisi Demografis Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Penduduk

Penduduk Tapanuli Tengah tahun 2010 berpenduduk sekitar 311.232 jiwa dengan kepadatan penduduk 136 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2005-2010 sebesar 1,86% per tahun. Dan pada tahun 2021 penduduk Tapanuli Tengah berjumlah 365.177 jiwa, dengan komposisi penduduk dimana laki-laki berjumlah 183.814 dan perempuan 181.365 jiwa (49,80%).

2. Suku Bangsa

Tapanuli Tengah adalah kabupaten yang berada di pesisir barat Sumatra Utara. Mayoritas penduduknya adalah suku Batak, khususnya Batak Toba, dan

juga suku Pesisir yang sampai hari ini masih menuturkan bahasa Minangkabau dialek Pasisi. Ada juga sebahagian lagi Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Dairi. Suku pendatang lainnya yang mendiami Tapanuli Tengah cukup beragam seperti Minangkabau, Nias, Jawa, Aceh, Singkil, Tionghoa, dan suku lainnya.

3. Agama

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, sebagian besar penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah memeluk Agama Kekristenan yakni 57,32%, dimana mayoritas memeluk Protestan 44,91%, dan selebihnya Katolik sebanyak 12,41%. Pemeluk agama Islam juga cukup signifikan yakni 42,53% yang banyak dianut etnis Melayu pesisir dan sebagian dari suku Batak. Sebagian kecil memeluk Parmalim 0,10%, kemudian Buddha 0,05% yang umumnya dianut oleh etnis Tionghoa, dan Hindu dianut kurang dari 0,01%. Agama Kristen Protestan atau Katolik banyak dianut oleh Suku Batak Toba, Suku Batak Karo, Batak Dairi, Batak Simalungun, dan Nias, dan sebagian etnis Batak Angkola atau Mandailing, dan Tionghoa. Sementara agama Islam di Tapanuli Tengah umumnya dianut oleh Suku Batak Angkola, Batak Mandailing, sebagian Batak Toba, Sebagian Suku Batak Dairi (Pakpak), Minangkabau, dan Suku Melayu.

4. Organisasi/Komunitas/Film

Tapanuli Tengah adalah kabupaten yang memiliki segudang keunggulan mulai dari Keindahan Alam, Cagar budaya, dll. Tapanuli Tengah juga pernah menjadi lokasi syuting film Hollywood yaitu King Kong dan juga menjadi tempat lokasi syuting Film Mursala yang sekaligus memperkenalkan Tapanuli Tengah.

Di Tapanuli Tengah banyak kita temui Organisasi, baik itu Partai Politik, Karang Taruna, Forum Anak Horas Tapteng, KNPI dan masih banyak lagi.

4.2. Analisis Potensi Subsektor Perikanan

4.2.1. Perkembangan Subsektor Perikanan Di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Patut diingat, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km².

Dari total luas wilayah tersebut, sebanyak 3,25 juta km² di antaranya merupakan lautan, dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 2,55 juta km². Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berbentuk daratan. Sehingga jelas, dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Besarnya potensi kelautan dan perikanan itu sejatinya dapat menggambarkan pula perolehan devisa dari sektor itu, yang trennya terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Badan Pusat Statistik produksi perikanan menurut subsektor di tahun 2011 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.10 Produksi Perikanan Menurut Subsektor (Ton) di Tahun 2011-2020

Subsektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Budidaya										
Budidaya Laut	4.606	5.770	8.379	9.035	10.174	9.773	—	—	—	—
Jaring Apung Laut	—	—	—	—	—	—	76	22	15	12
Rumput Laut	—	—	—	—	—	—	9.746	9.187	8.547	8.445

Laut Lainnya	—	—	—	—	—	—	62	59	48	42
Tambak	1.603	1.757	2.345	2.428	2.499	3.012	—	—	—	—
Tambak Sederhana	—	—	—	—	—	—	1.669	2.295	2.320	2.346
Tambak Semi Intensif	—	—	—	—	—	—	990	472	396	332
Tambak Intensif	—	—	—	—	—	—	40	198	261	282
Kolam	1.127	1.434	1.774	1.964	2.043	2.289	—	—	—	—
Kolam Air Deras	—	—	—	—	—	—	70	92	87	106
Kolam Air Tenang	—	—	—	—	—	—	2.756	2.538	2.645	2.356
Karamba	131	178	200	221	194	204	244	250	191	207
Jaring Apung	375	455	505	501	536	502	—	—	—	—
Jaring Apung Tawar	—	—	—	—	—	—	354	398	467	443
Jaring Tancap	—	—	—	66	41	43	25	55	41	24
Mina Padi (Sawah)	86	82	97	144	148	178	83	205	289	251
Jumlah Perikanan Budidaya	7.929	9.676	13.301	14.359	15.634	16.002	16.115	15.772	15.306	14.845
Perikanan Tangkap										
Perikanan Laut	5.346	5.436	5.707	6.038	6.205	6.115	6.604	6.702	7.164	6.493
Perairan Umum	369	394	398	447	473	465	468	659	558	495
Jumlah Perikanan Tangkap	5.714	5.829	6.105	6.484	6.678	6.580	7.071	7.361	7.722	6.988
Total	13.643	15.505	19.406	20.843	22.312	22.583	23.186	23.133	23.028	21.833

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya perikanan di Indonesia mengalami pasang surut di setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2015 budidaya laut mengalami peningkatan senilai 10.174 dan ditahun 2017 hingga tahun berikutnya produksi perikanan tidak memiliki nilai.

Jumlah perikanan mengalami pasang surut di setiap tahunnya terlihat pada tahun 2016 jumlah perikanan tertinggi mencapai 16.115 dan memiliki nilai terendah pada tahun 2011 senilai 7.929.

4.2.2. Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan Di Indonesia

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, ekspor sektor perikanan periode Januari-November 2022 tercatat sebesar USD5,71

	Berat bersih : Ton											
Jepang	12.7 16,3	11.921 ,1	11.0 50,0	6.19 1,5	6.16 6,9	4.33 5,2	2.86 2,8	2.265, 4	3.025, 9	2.781, 4	1.431, 5	
Malaysia	26.1 74,2	27.756 ,2	25.5 38,0	30.7 21,2	25.1 10,9	23.3 84,7	26.6 19,4	28.359 ,8	30.225 ,9	30.861 ,9	31.665 ,5	
Singapura	20.0 14,5	24.181 ,6	22.0 81,6	22.9 24,4	19.7 60,3	18.1 43,6	17.5 28,1	15.452 ,2	15.591 ,1	15.235 ,2	14.597 ,7	
Amerika Serikat	640, 0	316,8	383, 2	641, 6	701, 1	287, 8	241, 5	171,0	101,6	22,9	194,6	
Taiwan	3.84 4,6	3.057, 7	2.72 1,2	2.66 9,8	2.36 1,7	2.04 1,0	1.90 6,9	2.311, 3	2.448, 9	1.740, 6	1.378, 7	
Arab Saudi	1,1	58,2	99,0	503, 2	1.13 1,9	886, 3	809, 4	697,8	262,1	105,9	166,2	
Hongkong	936, 1	1.002, 5	1.29 8,6	1.42 5,3	1.91 7,4	2.33 3,2	2.34 1,2	2.124, 3	2.519, 9	1.074, 6	893,5	
Tiongkok	13.9 19,7	8.740, 4	3.20 2,6	461, 0	1.12 1,3	897, 9	1.72 5,7	1.874, 1	2.617, 4	3.151, 5	1.207, 7	
Australia	571, 2	710,8	457, 4	552, 3	432, 5	378, 8	367, 4	320,8	271,7	197,0	220,1	
Uni Emirat Arab	139, 6	54,6	47,9	150, 3	462, 0	722, 6	298, 9	144,5	58,6	7,7	0,4	
Lainnya	12.7 43,8	20.279 ,1	1.09 9,3	977, 9	818, 0	571, 1	260, 1	185,5	571,2	138,0	297,1	
Jumlah	91.7 01,1	98.079 ,0	67.9 78,8	67.2 18,5	59.9 84,0	53.9 82,2	54.9 61,4	53.906 ,7	57.694 ,3	55.316 ,7	52.053 ,0	
	Nilai FOB : 000 US\$											
Jepang	89.5 47,1	69.251 ,6	59.4 78,0	34.1 44,1	32.9 78,6	24.9 78,5	16.3 64,1	12.148 ,8	15.173 ,8	12.264 ,6	8.053, 1	
Malaysia	34.1 21,2	35.821 ,0	34.9 68,3	65.1 04,4	31.8 51,0	30.7 45,6	35.0 31,9	50.970 ,4	47.183 ,7	47.336 ,3	51.095 ,9	
Singapura	29.3 18,5	33.407 ,4	32.2 24,3	47.3 54,7	29.5 69,6	26.2 91,4	27.8 62,6	32.241 ,4	34.762 ,9	36.987 ,1	34.529 ,2	
Amerika Serikat	6.20 0,0	3.198, 5	3.35 5,7	5.08 8,2	6.56 7,4	2.92 6,4	2.52 0,7	1.641, 5	703,0	107,0	1.703, 0	
Taiwan	8.70 2,7	8.587, 1	7.77 5,3	6.73 7,4	6.29 3,6	5.75 9,8	5.61 4,8	8.983, 1	7.674, 0	5.258, 4	4.951, 0	
Arab Saudi	12,7	136,4	352, 7	2.08 6,7	4.76 6,5	3.27 7,9	2.82 0,0	2.506, 0	944,2	328,5	565,1	
Hongkong	4.42 2,9	4.339, 9	3.45 0,0	3.20 3,7	4.40 1,0	6.23 4,1	7.34 2,2	7.071, 8	7.539, 6	3.015, 8	3.035, 4	
Tiongkok	7.61 2,6	4.975, 4	2.42 1,3	1.14 8,6	3.80 2,7	2.74 1,0	4.23 8,4	6.590, 3	7.808, 0	10.613 ,9	3.789, 6	
Australia	2.20 0,6	4.008, 3	2.55 0,5	3.21 3,0	3.45 1,5	3.30 0,4	2.23 6,9	2.064, 8	2.241, 6	2.229, 2	2.392, 8	
Uni Emirat Arab	647, 1	320,6	493, 0	1.07 4,0	2.27 1,9	4.03 4,8	1.03 5,5	471,2	163,8	23,6	2,2	
Lainnya	22.9 28,0	14.877 ,0	2.54 5,3	2.59 1,9	2.00 3,5	1.59 3,3	732, 0	398,8	1.588, 1	347,0	979,3	
Jumlah	205. 713, 4	178.92 3,2	149. 614, 4	171. 746, 7	127. 957, 3	111. 883, 2	105. 799, 1	125.08 8,1	125.78 2,7	118.51 1,4	111.09 6,6	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2012 Malaysia berada di posisi pertama ekspor ikan terbanyak pertonnya, dan memiliki ekspor ikan paling sedikit terdapat pada negara Arab Saudi mencapai 1,1. Menurut nilai FOB negara tertinggi ekspor perikanan terdapat pada negara Jepang sebesar 89.547,1, dan negara sedikit terdapat pada negara Uni Emirat Arab dengan nilai 647,1.

4.2.3. Perkembangan Sektor Perikanan Di Sumatera Utara

Potensi Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terdiri dari Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dimana Potensi Perikanan Tangkap terdiri Potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya terdiri Budidaya tambak 20.000 Ha dan Budidaya Laut 100.000 Ha, Budidaya air tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan Pesisir Sumatera Utara mempunyai Panjang Pantai 1300 Km yang terdiri dari Panjang Pantai Timur 545 km, Panjang Pantai Barat 375 Km dan Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru sepanjang 350 Km.

Sedangkan wilayah pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah Pengembangan yang terdiri dari :

1. Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dimana Potensi Pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari Rumpun Laut, Kerapu dan kakap, Budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, Lele, Patin, Gurame, Tawes dan Nilam. Budidaya Tambak yang terdiri dari Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng.

2. Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah Wilayah yang berada di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan Potensi Pengembangan pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan. Budidaya air tawar yaitu Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame.

3. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

Terdapat 11 Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Dimana potensi pengembangan di wilayah Timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau, Budidaya Tawar yaitu Mas, Nila, Lele, Patin, Gurame, Grass carp, Lobster air tawar, Bawal tawar dan Ikan hias, Budidaya Tambak yaitu Rumpun Laut, Udang

Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng, sedangkan Budidaya perairan umum yaitu Mas, Nila dll.

4.2.4. Produk Domestik Regional Bruto Di Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.12. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2013-2022

Tahun	DPRB Perikanan
2013	469.464,02
2014	521.954,95
2015	571.722,01
2016	626.062,91
2017	684.634,43
2018	741.347,43
2019	799.608,95
2020	811.188,31
2021	859.934,26
2022	955.193,09

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto pertahunnya memiliki peningkatan di setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2013 dengan nilai 469.464,02 dan nilai tertinggi di tahun 2022 senilai 955.193,09.

4.2.5. Ekspor Perikanan di Sumatera Utara

Menurut Edi selama kurun waktu Januari hingga Februari 2020, aktivitas ekspor ikan dan udang Sumut yang dikapalkan melalui Pelabuhan Belawan ke Tiongkok yang mendapat sertifikat karantina meningkat tajam sekitar 386,59 % yakni dari 1.253 ton pada 2019 menjadi 6.097 ton di 2020. Selain volume ekspornya, nilai ikan dan udang ekspor ke negeri Tirai Bambu itu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jika selama Januari-Februari 2019 nilai ekspornya sebesar Rp 35,850 miliar maka di dua bulan pertama 2020 nilai ekspornya mencapai 240,641 miliar atau naik sekitar 571,24 %.

Edi menilai selama Februari 2020 jumlah jenis ikan dan udang yang diekspor ke Tiongkok melalui Pelabuhan Belawan juga mengalami peningkatan. Di mana selama Januari jumlahnya 14 jenis, sementara di bulan Februari naik menjadi 24 jenis. Jenis ikan tersebut katanya lagi yakni ikan layur, cumi-cumi, sotong, ikan malong, gurita, lizard fish, silver biddy, ikan kambing-kambing, bawal putih, gulama, udang vaname, tenggiri, ikan sange, siput, ikan kurisi merah, ikan ekor merah, ikan biji nangka, bawal hitam dan ikan nila.

Negara tujuan ekspor ikan dan udang Sumut melalui Pelabuhan Belawan selama ini yakni Amerika Serikat, Eropa, Malaysia, Tiongkok, Korea. Mesir dan Kanada. Sementara Negara tujuan terbesar yakni Amerika. Agar komoditas ikan dan udang bisa diekspor, kami terlebih dahulu menerbitkan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Product), untuk memastikan keamanan, mutu dan kualitasnya. Meningkatnya ekspor ikan dan udang Sumut ke Cina melalui Pelabuhan Belawan membuktikan bahwa merebaknya kasus virus Corona tidak bermasalah terhadap sektor perikanan.

Pengeksporan ikan dari Sumatera Utara pertahunnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Ekspor Perikanan Di Sumatera Utara 2013-2022

No	Tahun	Ekspor Perikanan di Sumatera Utara
1	2013	9.598,008
2	2014	9.361,110
3	2015	7.752,786
4	2016	7.770,742
5	2017	9.225,286
6	2018	8.787,220
7	2019	7.678,558
8	2020	8.086,221
9	2021	11.874,667
10	2022	13.115,263

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas di jelaskan pada tahun 2022 ekspor perikanan di Sumatera Utara ke berbagai negara memiliki nilai tertinggi sebanyak 13.115,263, dan di tahun 2015 menjadi ekspor perikanan terendah sebanyak 7.752,786.

4.2.6. Perkembangan Subsektor di Kabupaten Tapanuli Tengah

Perekonomian Tapanuli Tengah pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tapanuli Tengah tahun 2022 mencapai 4,18 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan akibat pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 11,77 persen, lapangan usaha lain yang pertumbuhannya terbesar adalah perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,91 persen, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 7,74 persen, penyediaan Akomodasi dan Makan minum sebesar 7,70 persen. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,02 persen, Industri pengolahan sebesar 1,87, dan konstruksi sebesar 3,01 persen.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Tengah mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat sejak tahun 2018 sampai 2019, kontraksi pada tahun 2020, dan naik pada tahun 2021 sampai 2022. Sepanjang tahun 2018 sampai

2022, pertumbuhan ekonomi tapanuli tengah cenderung berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tapanuli tengah sebesar 4,18 persen, sedangkan Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,73 persen.

4.2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Tapanuli

Tengah

PDRB Tapanuli Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 11,64 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,45 triliun Rupiah. Selama lima tahun terakhir PDRB atas dasar harga konstan berfluktuasi, pada tahun 2018 sampai 2019 menunjukkan peningkatan, sementara pada tahun 2020 menurun, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 2013-2022

Tahun	PDRB Perikanan
2013	5.914,05
2014	6.516,46
2015	7.140,28
2016	7.849,65
2017	8.545,38
2018	9.229,98
2019	9.956,78
2020	10.138,83
2021	10.618,75
2022	11.635,30

Sumber : Tinjauan Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari tabel di atas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto pertahunnya memiliki peningkatan di setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2013 dengan nilai 5.914,05 dan nilai tertinggi di tahun 2022 senilai 11.635,30.

Tabel 4.15. PDRB Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, 2018-2022

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2018	9 229,98	6 678,25
2019	9 956,78	7 024,15
2020	10 138,83	6 970,58
2021	10 618,75	7 149,28
2022	11 635,30	7 447,83

Sumber : Tinjauan Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 harga berlaku mencapai 9.229,28 dan harga konstan mencapai 6.678,25, hingga terus meningkat sampai pada tahun 2022 harga berlaku 11.635,30 dan harga konstan 7.447,83. Di tahun 2020 harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 10.618,75 akan tetapi harga konstan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6.980,58.

4.2.8. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Perikanan Di

Tapanuli Tengah

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Tipe C yang merupakan unsur- unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang kelautan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. pelaksanaan evaluasi, administrasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Dorong peningkatan ekonomi masyarakat, Bupati Tapanuli Tengah berikan bantuan perikanan kepada 1.053 pelaku usaha perikanan se Kabupaten Tapanuli Tengah , untuk tahap awal disearahkan sebanyak 148 bantuan kepada pelaku usaha perikanan yang dilaksanakan di Balairung Pasar Hajoran Indah , dan kelurahan Muara Nibung Pandan .

- Alat penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Gillnet), masing- masing menerima 2 set bantuan yang diberikan kepada 110 orang di Kecamatan Badiri, Pandan, Tapan Nauli , Sosorgadong, dan sarudik.
- Alat penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Jaring Kepiting, masing- masing menerima 2 set bantuan yang diberikan kepada 65 orang di Kecamatan Andam Dewi, Pandan, Sorkam, Sorkam Barat, dan Tapanuli Nauli.

- Alat Penangkapan ikan Ramah lingkungan (Jaring Tenggiri), masing-masing menerima 2 set bantuan yang diberikan kepada 53 orang di Desa Pasar Terendam Kecamatan Barus.
- Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Pancing Ulur) Untuk Nelayan (ABK), masing- masing menerima 1 blong dan 1 pancing yang diberikan kepada 200 orang di Kecamatan Badiri, Kolang, Pandan, Sibabangun, Sarudik, Sorkam Barat, Tapian Nauli, dan Tukka.
- Panel Surya Untuk Kapal Nelayan Tradisional, masing- masing menerima 1 set yang diberikan kepada 75 orang di Kecamatan Barus, Kolang, Sarudik, Sosorgadong, dan Tapian Nauli.
- Genset untuk Nelayan Bagan Pancing , masing- masing menerima 1 set yang diberikan kepada 100 orang di Kelurahan Hajoran , Kelurahan Hajoran Indah , dan Kelurahan Nibung Kecamatan Pandan.
- Coolbox untuk Nelayan Tradisional, masing- masing menerima 1 unit ukuran 100 kg yang diberikan kepada 168 orang di Kecamatan Andam Dewi, Barus, Badiri, Manduamas, Kolang, Pandan, Sarudik , Sorkam, dan Tapian Nauli.
- Benih Ikan Lele, masing- masing menerima 4.000 ekor benih ikan yang diberikan kepada 100 orang Kecamatan Tapian Nauli, Badiri, Tukka, Pandan, Barus, Barus Utara, Andam Dewi, Sorkam, Sirandorung, Pinang Sori, Sarudik, Sosorgadong, Sibabangun, dan Sorkam Barat.
- Benih Ikan Nila, masing- masing menerima 1. 761 ekor benih ikan yang diberikan kepada 50 orang di Kecamtan Sibabangun, Pandan, Tukka,

Sarudik, Tapanian Nauli, Sorkam, Sorkam Barat, Andam Dewi, Lumut, Barus, Sitahuis, Badiri, dan Kolang.

- Coolbox, masing- masing menerima 1 unit yang diberikan kepada 150 orang di Kecamatan Barus, Pandan, Lumut, Pinangsori, Sarudik, Sorkam Barat, Tapan Nauli, dan Tukka.

4.3. Analisis Potensi Subsektor di Kabupaten Tapanuli Tengah

Data analisis Location Quantient (LQ) dapat di ambil dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi sumatera utara dan kabupaten tapanuli tengah dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$LQ = \frac{Sij/Sj}{Sin/Sn}$$

Keterangan:

Sij : PDRB pada subsektor i pada wilayah analisis kabupaten tapanuli tengah

Sj : PDRB pada wilayah analisis kabupaten tapanuli tengah

Sin : PDB pada subsektor i di wilayah sumatera utara

Sn : PDB di wilayah sumatera utara

Dengan menggunakan rumus di atas, maka jumlah LQ dapat diperoleh pada tabel berikut.

Tabel 4.16. Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sub Sektor Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun	Sektor Perikanan
2013	79,38
2014	80,10
2015	80,07
2016	79,76
2017	80,12
2018	80,32

2019	80,31
2020	80,01
2021	80,98
2022	82,09

Sumber : Hasil yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan LQ diatas maka,

LQ < di tahun 2013 dan di tahun 2016

LQ > di tahun 2022

LQ = di tahun 2014, 2015, 2017, 2018,2019,2020 dan di tahun 2021

Hasil perhitungan LQ untuk PDRB perikanan di Tapanuli Tengah LQ < di tahun 2013 dan di tahun 2016 mengalami peranan sektor lebih besar dari pada nasioanal yang berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor dan LQ > di tahun 2022 bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut perlu melakukan impor karena sektor perikanan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah dari pada nasinoanal sedangkan LQ = di tahun 2014, 2015, 2017, 2018, dan tahun 2021 mengindikasikan bahwa adanya produktivitas berimbang yang berari sektor perikanan ini masih belum layak untuk di ekspor yang berarti peranan sektor perikanan di Kabapaten Tapanuli Tengah sama baik ataupun secara nasional. Disetiap tahunnya dapat dirangkumkan dari tahun terendah. Dengan nilai LQ terendah dapat dilihat pada tahun 2013 senilai 79,38 dan LQ tertinggi terdapat pada tahun 2022 senilai 82,09. Nilai LQ yang diperoleh guna menghitung nilai subsektor perikanan yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Hasil LQ dapat diperoleh dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sumatera Utara dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara pembagian sesuai rumus.

Dari hasil pembagian PDRB Sumatera Utara dengan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah maka hasil LQ dapat diperoleh mulai dari tahun 2013 dengan angka 79,38 menjadi nilai terkecil dari tahun lainnya. Kemudian tahun 2014 dengan angka 80,10 menjadi angka dengan nilai diatas normal, lalu di tahun 2015 dengan angka 80,70 menjadi nilai tertinggi dari tahun sebelumnya, lalu di tahun 2016 dengan nilai 79,76 menjadi nilai kedua yang rendah, dimana angka hasil perikanan pada tahun tersebut mengalami penurunan. Di tahun 2017 dengan angka 80,12 hasil pendapatan perikanan mulai naik kembali dari tahun sebelumnya, di tahun 2018 80,31 angka subsektor mulai naik secara perlahan, namun di tahun 2019 80,31 nilai subsektor mulai mengalami penurunan kembali hingga 1 persen, di tahun 2020 nilai kembali mengalami penurunan hingga 80,01, di tahun 2021 angka subsektor mulai naik kembali 80,98 dan kembali naik drastis hingga mencatat angka tertinggi di sepuluh tahun terakhir senilai 82,09. Hasil LQ yang di ambil merupakan dari hasil atas harga berlaku berupa ton perikanan di tapanuli tengah menurut angka tahunnya. Hasil LQ yang diperoleh dapat digunakan untuk perbandingan penghasilan perikanan di tapanuli tengah untuk tahun berikutnya.

Untuk mendapatkan hasil nilai shift-share maka langkah-langkahnya akan peneliti sajikan dalam tabel secara berurutan yaitu Perhitungan National Share, Propotional Shift, dan selanjutnya Differential Shift. Data yang digunakan dalam menghitung Shift Share yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan Sumatera Utara dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dimana dapat di hitung menggunakan

rumus masing – masing shift share seperti national share, proportional share dan different share. Perhitungan National Share dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17. Tabel National Share

Tahun	Er,i,t-n	EN,t/EN,t-n		National Share
	A	B	c= axb	d= c-a
2013	11.904.982,7	1,0026	11,935,935.66	30,952.96
2014	13.117.634	1,0026	13.151,739.85	34,105.85
2015	14.373.383,6	1,0026	14.410,754.40	37,370.80
2016	15.801.345,5	1,0026	15.842,429.00	41,083.50
2017	17.201.849,9	1,0026	17.246,574.71	44,724.81
2018	18.579.949,7	1,0026	18.628,257.57	48,307.87
2019	20.042.998,1	1,0026	20.095,109.90	52,111.80
2020	20.409.464,8	1,0026	20.462,529.41	53,064.41
2021	21.375.543,8	1,0026	21.431,120.21	55,576.41
2022	23.421.858,9	1,0026	23.482,755.73	60,896.83

Sumber : Hasil yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui untuk melihat hasil dasar harga sektor perikanan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2022 menggunakan rumus national share yang adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap Kabupaten Tapanuli Tengah yang setiap tahunnya bernilai positif, national share memperoleh hasil terbesar ada di tahun 2022 dengan nilai 60,896.83, sedangkan yang terkecil terdapat di tahun 2013 dengan angka 30,952.96. hasil dari perhitungan national share pada setiap tahunnya menghasilkan nilai positif dimana pada hasil national share pada tiap tahunnya mengalami peningkatan cukup baik setiap tahunnya dan hasil national share dihitung dari penjumlahan angka sektor perikanan yang di hasilkan atas harga berlaku di setiap tahunnya kemudian dihasilkan menggunakan rumus national share sehingga mendapatkan jumlah untuk satuan tonnya. Angka tersebut dapat digunakan sebagai bentuk perbandingan adanya peningkatan atau penurunan hasil harga sektor perikanan di setiap tahunnya, sehingga adanya peningkatan ekonomi sebagai acuan kedepannya dalam sektor perikanan.

Perhitungan Proportional Shift

Proportional shift digunakan untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan.

Keterangan :

E = Employment atau banyaknya lapangan kerja

r = Region atau wilayah analisis

i = Sektor Industri

t - n = Tahun awal

t = Tahun

N = National atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi
Jenjangnya

Jadi Proportional shift dapat di rumuskan dan disusun pada tabel berikut.

Tabel 4.18. Proportional Shift

Tahun	$E_{r,i,t-n}$	$EN_{i,t}/EN_{i,t-n}$	EN_{t}/EN_{t-n}		Proportional Share
	A	B	C	$d=b-c$	$e=axd$
2013	11.904.982,7	1	1,0026	-0,0026	-30952.95502
2014	13.117.634	1,0005	1,0026	-0,0021	-27547.0314
2015	14.373.383,6	1,0010	1,0026	-0,0016	-22997.41376
2016	15.801.345,5	1,0015	1,0026	-0,0011	-17381.48005
2017	17.201.849,9	1,0020	1,0026	-0,0006	-10321.10994
2018	18.579.949,7	1,0025	1,0026	-0,0001	-1857.99497
2019	20.042.998,1	1,0030	1,0026	-0,0004	8017.19924
2020	20.409.464,8	1,0035	1,0026	-0,0009	18368.51832
2021	21.375.543,8	1,0040	1,0026	-0,0014	29925.761
2022	23.421.858,9	1,0045	1,0026	-0,0019	44501.53191

Sumber : Hasil yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki proportional share terbesar berada di tahun 2022 dengan nilai 44501.53191. Hasil yang di dapatkan dari perhitungan Proportional share memiliki hasil yang positif atau peningkatan ekonomi pada sektor perikanan di kabupaten tapanuli tengah. Hal ini dapat diketahui bahwa jumlah dasar harga dalam Proportional share mengalami

peningkatan ekonomi. Sedangkan dari tahun 2013 sampai 2018 perhitungan Proportional share memiliki hasil yang negatif atau peneurunan ekonomi pada sektor perikanan di kabupaten tapanuli tengah hal ini dapat diketahui bahwa jumlah dasar harga dalam Propotional share mengalami penurunan ekonomi. Angka tersebut untuk mengukur perubahan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan, pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor perikanan yang tumbuh lebih cepat di bandingkan perekonomian yang di jadikan acuan.

Perhitungan Differential Shift dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.19. Differential Shift

Tahun	$E_{r,i,t}$	$EN_{i,t}/EN_{i,t-n}$	$E_{r,i,t-n}$		Different Share
	A	B	C	$d=bx_c$	$e=a-d$
2013	11.904.982,65	1	11.904.982,7	11.904.982,7	-0,05
2014	13.124.150,44	1,0005	13.117.634	13.124.192,82	-42,38
2015	14.387.664,2	1,001	14.373.383,6	14.387.756,98	-92,78
2016	15.824.894,4	1,0015	15.801.345,5	15.825,047,52	-153,12
2017	17.236.031,46	1,002	17.201.849,9	17.236,253,60	-222,14
2018	18.626.099,64	1,0025	18.579.949,7	18.626.399,57	-299,93
2019	20.102.738,82	1,003	20.042.998,1	20.103.127,09	-388,27
2020	20.480.436,6	1,0035	20.409.464,8	20.480.897,93	-461,33
2021	21.460.493,75	1,004	21.375.543,8	21.461.045,98	-552,23
2022	23.526.576,6	1,0045	23.421.858,9	23.527.257,27	-680,67

Sumber : Hasil yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor yang Different share dari tahun 2013 – 0,05 sampai tahun 2022 -461,133 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau negatif. Tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diakibatkan oleh sektor-sektor perikanan yang tumbuh lebih lambat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor- faktor lokasional intern, secara lokasional tidak menguntungkan

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
2. Subsektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu dari sektor pertanian yang diketahui memiliki potensi besar yang dapat terus dikembangkan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari sumberdaya hayati yang melimpah pada subsektor ini serta memiliki nilai ekonomi tinggi.
3. Perekonomian Tapanuli Tengah pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tapanuli Tengah tahun 2022 mencapai 4,18 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan akibat pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif.

4. Hasil LQ pada tiap sektor di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan di tahun 2021.

5.2. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Karena sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.
2. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi perikanan yang cukup besar mengingat wilayahnya sebagian merupakan kawasan pantai yang luas yang dapat dikembangkan untuk berbagai komoditi perikanan laut, budidaya laut dan budidaya air tawar. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan jumlah produksi kelautan dan perikanan, meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha-usaha kelautan dan perikanan, meningkatkan lapangan kerja dan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan konsumsi ikan dan terpenuhny bahan baku industri perikanan lokal.

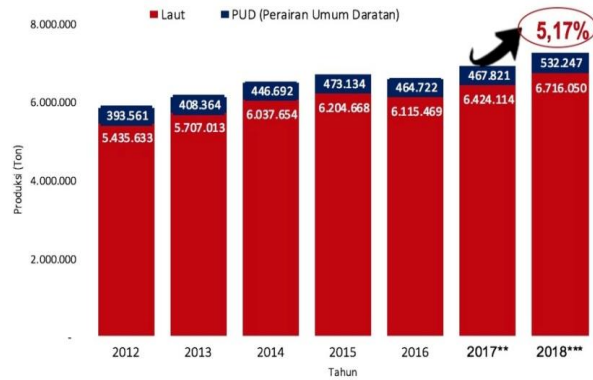
DAFTAR PUSTAKA

- Ameriyani, P. (2014). Perencanaan Pengembangan Subsektor Perikanan Laut di Lima Kecamatan di Kabupaten Rembang. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 225–234.
- Gaurahman, F. (2020). Analisis Pengaruh Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kebijakan Riset Dan Inovasi*, 4(1), 18–40.
- Hersey, P., & Blanchard, K. (2016). *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat*. Erlangga.
- Ilyas, S., & Cholik, F. (2017). *Strategi Penelitian untuk Mendukung Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan dalam PJP II. Dalam: Prosiding Temu Karya Ilmiah Pikiran Rakyat. Alie Poernomo (eds)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
- Lailan Safina Hsb, Salman Paris. (2020). Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010-2017. *Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan*. Vol. 2. No.1 2020
- Maulidia, A. D. S. (2018). Analisis Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 687–695.
- Pradana, R. S. (2019). Peluang Dan Tantangan Subsektor Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 113–126.
- Richard, G., & Lipsey, S. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bina Aksara.
- Rokhmin, D. (2014). *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut*. Pradnya Paramita.
- Saefullah, W. E. (2018). *Tanggungjawab pengangkut dalam Hukum. Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Liberty.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Sri Endang Rahayu, Nel Ariyanti, Fajar Kurniawan (2022). Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan di Indonesia. *Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan*. Vol.22 No.2. 2022
- Sri Endang Rahayu, Prawidya Hariani RS, Elizar Sinambela. (2022). Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Dalam

Mencapai Blue Economy. Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan. Vol.2 No.1 2022

- Sukirno, S. (2016). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, R. (2017). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Tibarani. (2018). Peranan Subsektor perikanan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, 20(2), 206–217.
- Wijaya, I. A. (2022). Analisis potensi sektor ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen). *Journal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 63–73.

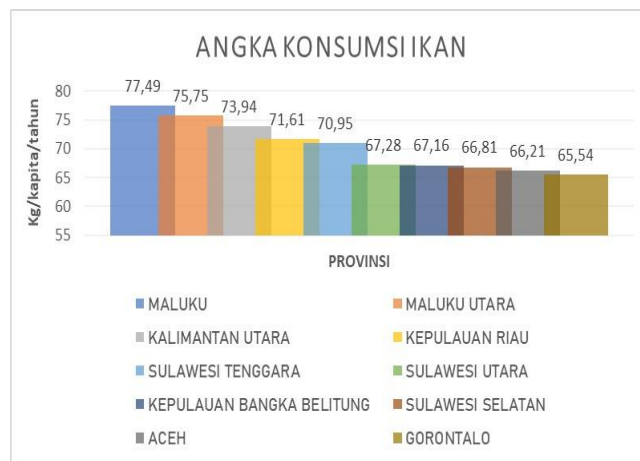
LAMPIRAN



Gambar 1. Data PDB Kelautan 2012 – 2018



Gambar 2. Hasil Ekspor Impor produk perikanan Indonesia Periode Januari-Juli 2022



Gambar 3. Sepuluh provinsi dengan angka perikanan tertinggi 2021



Gambar 4. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan 2017-2018



Gambar 5. Peta wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah